

# Laporan nilai tambah dalam penilaian kinerja BUMN : suatu alternatif penyajian laporan keuangan

Ika Hikmawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20184342&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Penetapan tingkat kesehatan BUMN seperti yang terdapat dalam Instruksi Presiden no. 5 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMN didasarkan pada perhitungan tingkat rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas (RLS) yang dicapai perusahaan selama tiga tahun.

Hasil penilaian yang diperoleh dengan menggunakan metode RLS tersebut dinilai masih memiliki kelemahan, karena sifatnya yang memukul rata semua BUMN tanpa membedakan jenis usaha dan sifat pelayanannya.

Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencoba mengemukakan suatu alternatif penyajian laporan keuangan nilai tambah dengan tujuan agar ada suatu tolak ukur yang jelas mengenai tingkat keberhasilan BUMN tanpa maksud memberikan perkecualian terhadap adanya ketidakefisienan pada BUMN tertentu.

Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitian kepustakaan dan studi lapangan, berupa tanya jawab dengan Laporan Nilai..., Ika Hikmawati, FEB UI, 1993 pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis.

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa dengan bergesernya tujuan perusahaan dari memaksimalkan tingkat laba ke pemberian kesejahteraan kepada beberapa kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan perusahaan maka peranan laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan menjadi semakin penting.

Dalam hubungannya dengan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan BUMN yang dilaksanakan BPKP, diperlukan adanya suatu kajian dan penelitian menyangkut pemanfaatan atau penyajian laporan nilai tambah. Penelitian ini sebaiknya mengkaji dampak yang mungkin timbul atas diterbitkannya laporan nilai tambah bagi pemakai laporan keuangan BUMN yang bersangkutan. Agar penelitian sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sebaiknya IAI sebagai organisasi profesi di Indonesia yang sekaligus

membawahi komite PAI juga melakukan penelitian untuk maksudmaksud pelaporan eksternal BUMN.

Apabila dikemudian hari BPKP dan IAI mengharuskan disajikan laporan nilai tambah, sebaiknya diatur secara tegas format dan bagaimana mengklasifikasikan laporan nilai tambah. Dengan demikian hanya sedikit diberikan alternatif alternatif pemilihan yang dapat mengarah pada ketidakseragaman, sehingga para pemakai akan mudah untuk mempergunakan informasi yang dalam laporan nilai tambahan